

KURIKULUM PEMBINAAN BUDI PEKERTI BERBASIS KELUARGA

Oleh
Fahrul Razi

(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Pontianak)

Abstrak: Model kurikulum pembinaan budi pekerti berbasis keluarga sudah diterapkan di sekolah-sekolah di lingkungan Kota Pontianak. Implementasi model ini dalam proses pembinaan akhlak siswa di sekolah tidak dikonstruksi untuk disajikan dalam bentuk mata pelajaran tertentu, terintegrasi dengan mata pelajaran atau seperti pada model training yang pernah dicobakan di berbagai sekolah. Secara khusus, model ini merupakan usaha sekolah dan keluarga dengan mengondisikan terbentuknya perilaku anak yang baik berdasarkan ajaran agama. Pengondisiannya dilakukan dengan cara: memantau perilaku anak selama di sekolah dan di rumah, membiasakan anak agar berperilaku agamis, dan melakukan tindakan perbaikan terhadap perilaku anak yang kurang baik.

Kata Kunci: Model, budi pekerti, *need assesment*.

Pendahuluan

Pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kognitif ternyata telah menimbulkan banyak petaka di negeri ini. Korupsi, manipulasi, pelanggaran HAM, dan tindakan kriminal, ternyata banyak dilakukan oleh mereka yang terdidik. Krisis multidimensi di negeri ini juga berawal dari pendidikan yang hanya mampu menghasilkan orang cerdas secara intelektual, namun tidak dibarengi oleh penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moral.

Dalam beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan orang untuk kembali kepada nilai-nilai moral yang berlandaskan agama. Pendidikan yang dikembangkan di Indonesia lebih dari seperempat abad belakangan ternyata melahirkan masalah besar bagi negeri ini. Pendidikan persekolahan kita memang harus diakui mampu menjadikan banyak orang cerdas yang

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak di antaranya jadi ahli ekonomi, politik, teknik, dan sebagainya. Karena keahliannya tadi ada di antaranya yang menjadi pejabat pemerintah, baik pejabat di daerah maupun di tingkat pusat. Karena keahliannya pula, banyak di antara mereka yang bekerja sebagai pegawai di instansi pemerintah baik sipil maupun militer. Namun, coba kita lihat kehidupan di negeri ini. Korupsi merajalela, terjadi di mana-mana dari tataran paling atas hingga tataran paling bawah, di hampir semua institusi: eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Korupsi dianggap biasa, dan lebih sering disebut dengan “*chance*”, jadi dianggap bukan korupsi. Manipulasi biaya pembangunan dalam bentuk “*mark-up*” dianggap hal yang biasa. Siapa pelakunya? Ternyata adalah orang-orang terdidik. Dekadensi moral

terjadi pada semua lapisan masyarakat akibat suguhan berbagai fasilitas tontonan. Siapa pelaku yang menyuguhkan tontonan yang merusak anak negeri ini? Ternyata juga orang-orang terdidik.

Dalam konteks global, pendidikan kita yang sudah lemah dalam pembinaan sikap dan perilaku terpuji makin mendapat tekanan luar biasa dari berbagai sisi. Kemajuan teknologi komunikasi mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas. Apa yang terjadi di berbagai belahan dunia, dapat disaksikan oleh masyarakat kita dalam sekejap. Bahkan di sudut-sudut desa yang jauh dari kota juga menyaksikan hal yang sama dengan mereka yang tinggal di kota. Keadaan seperti ini mestinya menjadikan kita makin mengerti makna pendidikan bagi masa depan bangsa ini. Menurut Tu Wei-Ming (dalam Harison & Huntington, 2000:263) pendidikan seyogianya “roh”nya masyarakat, dan tujuan utamanya adalah membangun manusia berpribadi utuh. Pendidikan dalam kaitan ini harus mampu membangun modal sosial (*social capitals*) seperti kejujuran, kepercayaan, kesediaan dan kemampuan bekerja sama, kemampuan berkoordinasi, toleransi, kebiasaan berkontribusi pada sesama, dan sebagainya, melalui proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah, di samping menyiapkan anak didik menguasai pengetahuan dan ketrampilan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Nurudin, 2001) moral berarti ajaran baik-buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila. Sedangkan bermoral adalah memunyai pertimbangan baik buruk, berakhlak

baik. Menurut Immanuel Kant (Magnis Suseno, 1992), moralitas akhlak maupun budi pekerti adalah hal keyakinan dan sikap batin dan bukan sekadar penyesuaian dengan aturan dari luar, entah itu aturan hukum negara, agama, atau adat-istiadat. Selanjutnya dikatakan bahwa, kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiiaannya pada hatinya sendiri. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak.

Secara politis tujuan pendidikan nasional Indonesia sangat mulia. Pasal 3 Bab II Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam implementasinya justru pengembangan ilmu (kognisi) siswa yang mendapat perhatian, sementara aspek lain terabaikan. Singkat kata, pendidikan kita belum mampu membangun manusia Indonesia berakhlak mulia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu.

Kehidupan bersifat siklikal: lahir – berkembang – dewasa – menurun – dan akhirnya mati, atau dari tidak berkemampuan – berkemampuan – mahir – dan kembali bertidakkemampuan. Dalam dunia persekolahan, kehidupan yang bersifat siklikal ini kurang diminati

dan dikaji bahkan cenderung dianggap tidak penting. Bahkan dalam pendidikan kewarganegaraan dan agama sekalipun, seringkali hal ini tidak mendapat perhatian. Lembaga persekolahan tidak lebih dari sekadar mengembangkan kognisi peserta didik, tanpa memperhatikan persoalan afektual peserta didik. Kondisi lembaga pendidikan seperti ini mengakibatkan nilai-nilai yang diajarkan oleh sekolah menjadi tidak mempribadi dalam kehidupan setiap peserta didik. Dampak yang dirasakan adalah nilai-nilai yang diyakini oleh peserta didik menjadi semua, tidak mempribadi dalam kehidupan peserta didik.

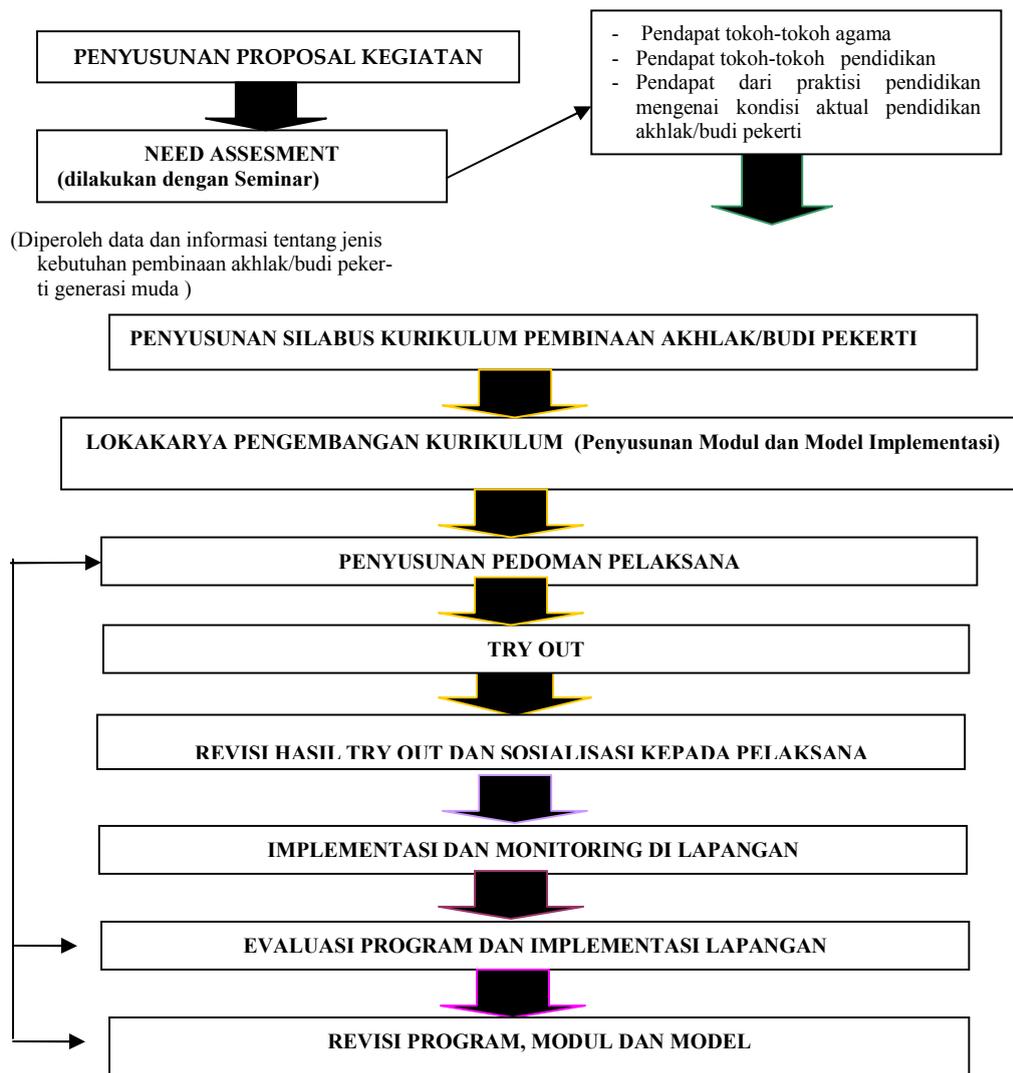
Meskipun tatanan dunia yang materialistik sudah sedemikian rupa, upaya untuk membangun manusia Indonesia yang utuh tidak boleh terabaikan, Harus ada upaya-upaya nyata untuk memperbaiki berbagai konsepsi pendidikan yang sudah banyak menimbulkan dehumanisasi tersebut. Salah satu di antaranya adalah membina pendidikan akhlak/budi pekerti anak setiap saat tanpa dibatasi oleh waktu, dan dilakukan oleh semua orang yang berada di sekitar anak. Atas dasar pemikiran inilah dicetuskan ide untuk

membangun sebuah model pembinaan akhlak atau budi pekerti berbasis keluarga. Dikembangkannya kurikulum model pembinaan akhlak/budi pekerti siswa berbasis keluarga ini didasarkan pada asumsi bahwa (1) Anak adalah amanah Allah, dititipkan kepada kedua orang tua untuk dididik; (2) Luang waktu peserta didik lebih banyak di luar sekolah; (3) Baik-buruknya akhlak anak cenderung ditentukan oleh kepedulian kedua orang tuanya; dan (4) Sekolah merupakan lembaga yang membantu pembentukan kepribadian anak.

Tulisan ini mengantarkan pembaca untuk memahami upaya pembinaan moral agar proses pendidikan di sekolah mampu menghasilkan orang cerdas yang disertai pemahaman dan pengalaman nilai moral yang tinggi. Dengan kata lain, agar pendidikan mampu menghasilkan orang cerdas secara intelektual yang memiliki akhlak dan budi pekerti terpuji.

Pengembangan Model

Tahapan pengembangan model pembinaan akhlak/budi pekerti berbasis keluarga dapat dikemukakan sebagai berikut.



BAGAN 1
TAHAPAN PENGEMBANGAN MODEL

Untuk pengembangan model pembinaan akhlak/budi pekerti berbasis keluarga ini diawali dengan langkah melakukan *need assesment* dalam bentuk kegiatan seminar untuk menemukan pola penyusunan silabus.. Dalam kegiatan seminar ini mengikutsertakan unsur dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, praktisi pendidikan mengenai kondisi aktual pendidikan akhlak/budi pekerti di lingkup lembaga pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan pada *proceeding* seminar itulah

kemudian diperoleh data dan informasi tentang jenis kebutuhan pembinaan akhlak/budi pekerti generasi muda yang diharapkan. Langkah berikutnya adalah kegiatan penyusunan silabus kurikulum pembinaan akhlak/budi pekerti yang melibatkan unsur guru (praktisi), pemerhati/pakar pendidikan dan tokoh agama. Langkah ketiga adalah mengadakan lokakarya untuk meng-himpun sekaligus mendapatkan masukan tentang bagaimana format model dan model implementasi yang

dinilai sesuai dengan tujuan pelaksanaan program ini. Pada langkah ini dihasilkan modul sebagai pedoman bagi guru maupun orang tua murid dalam melaksanakan kegiatan pembinaan budi pekerti/akhlak.

Setelah modul dan model implementasi ini dapat ditemukan, langkah berikutnya adalah penyusunan pedoman pelaksana modul dan model implementasi pengembangan kurikulum yang telah dirancang sebelumnya. Hal ini dipandang perlu dilakukan karena sebaik apa pun sebuah program tidak menutup celah adanya kemungkinan *handicap* dalam memahami maksud dan garis arah program yang diinginkan. Sedapat mungkin pedoman yang dibuat ini mampu memberikan penjelasan secara detail mengenai program yang akan dilaksanakan berikut garis arah program yang diinginkan.

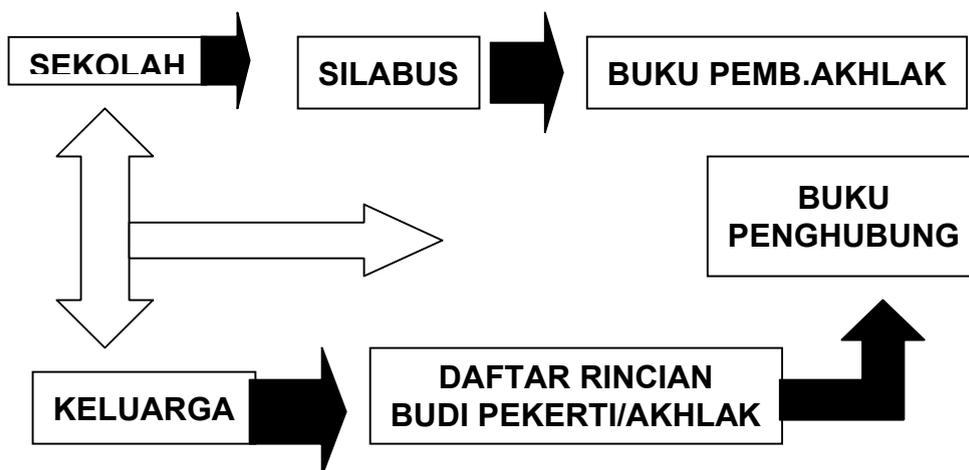
Langkah berikutnya adalah melakukan *try out*, *revisi* hasil *try out* dan sosialisasi berikut pelatihan penggunaan dan pelaksanaan manual/program dalam hal ini guru pendidikan agama dan guru PPKn.

Kemudian berdasarkan hasil revisi inilah kemudian dilaksanakan proses implementasi yang didampingi melalui kegiatan monitoring lapangan. Kegiatan monitoring ini dibutuhkan untuk memantau efektivitas dan efisiensi serta menjamin kebermutuan pencapaian tujuan program sebagaimana telah ditetapkan.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan ini selesai dilaksanakan langkah terakhir adalah melakukan tindak evaluasi untuk mengukur secara keseluruhan program yang telah ditetapkan berikut penemuan hasil-hasil yang dinilai signifikan dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya berdasarkan temuan evaluasi itulah dirumuskan kembali beberapa tindakan perbaikan jika masih ditemukan beberapa *handicap* program yang belum maksimal dilaksanakan

Implementasi Model

Skematik implementasi model pembinaan budi pekerti/akhlak berbasis keluarga dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:



BAGAN 2
SKEMATIK IMPLEMENTASI MODEL

Pada pihak sekolah, semua guru harus ikut terlibat sebagai guru Pembina Akhlak atau budi pekerti pada siswa yang seagama dengannya. Dalam perannya sebagai guru Pembina Akhlak, guru memainkan fungsinya untuk:

1. Menentukan aspek-aspek akhlak yang akan dibina. Aspek-aspek akhlak yang akan dibina ini tertuang dalam silabus pembinaan akhlak sesuai dengan agama yang dianut siswa dan jenjang atau satuan pendidikannya
2. Melakukan sosialisasi atau pertemuan dengan orang tua murid
3. Merespon permasalahan anak atas dasar informasi dari buku penghubung
4. Mengamati perilaku anak di sekolah dan mencatatnya di buku perkembangan akhlak/budi pekerti anak
5. Memberikan bimbingan terhadap anak yang bermasalah atau menunjukkan perilaku yang kurang atau tidak baik
6. Melakukan tindakan kuratif dalam pembinaan akhlak.

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Guru Pembina Akhlak, seorang guru harus berpedoman pada Silabus Pembinaan Budi Pekerti/Akhlak yang telah disusun. Silabus tersebut berisikan kompetensi dasar, indikator, dan bentuk penilaian. Secara praktis, silabus tersebut tidak perlu dikembangkan lagi oleh guru PA dalam bentuk penyusunan Satuan Pembelajaran maupun Rencana Pembelajaran, karena kegiatan pembinaan budi pekerti atau akhlak bukan sebagai mata pelajaran, tetapi lebih terarah pada ikhtiar untuk memberikan pembinaan. Begitu pula tentang aspek penilaian, dimaksudkan bukan

untuk dijadikan sebagai penentuan posisi anak terhadap anak yang lainnya (bukan untuk klassifikasi dan atau kebijakan kenaikan kelas), tetapi sebagai bahan atau *feed back* bagi guru PA untuk menentukan langkah pembinaan terhadap anak. Hasil kegiatan guru PA dalam membina budi pekerti/akhlak anak, selanjutnya dicatat dalam buku pembinaan akhlak/budi pekerti.

Pada sisi keluarga (ayah dan atau ibu) berperan untuk:

1. Mengamati perilaku anak selama di rumah
2. Mencatat adanya penyimpangan perilaku anak dalam buku penghubung
3. Bekerjasama dengan sekolah/guru dalam membina budi pekerti/akhlak anak.

Untuk dapat mengimplementasikan model pembinaan budi pekerti berbasis keluarga ini dengan benar, setiap guru diberikan panduan berupa silabus dan modul Pembinaan akhlak/budi pekerti. Silabus berisikan rincian kompetensi dasar yang akan dicapai, indikator dan bentuk penilaian. Sedangkan modul adalah panduan yang berisikan:

- Modul 1 : Arah pembinaan akhlak/budi pekerti
- Modul 2 : Strategi pembinaan akhlak/budi pekerti
- Modul 3 : Buku penghubung pembinaan akhlak/budi pekerti
- Modul 4 : Dimensi akhlak/budi pekerti,
- Modul 5 : Tindakan preventif pembinaan akhlak/budi pekerti
- Modul 6 : Tindakan kuratif pembinaan akhlak/budi pekerti

Modul 7 : Evaluasi pembinaan akhlak/budi pekerti

Cara Sekolah Membangun Kerjasama dengan Keluarga dalam Pembinaan Akhlak/Budi Pekerti

Sejak pertumbuhannya, telah tampak betapa besar pengaruh lingkungan terhadap perkembangan pribadi anak. Lingkungan keluarga adalah awal proses pembentukan pribadi anak. Di lingkungan ini anak yang dilahirkan tanpa mengenal moral, untuk pertama kalinya bersentuhan dengan nilai-nilai moral. Awalnya anak melihat dan mendengar apa yang terjadi dalam keluarga. Setelah itu, anak mulai menirukan apa yang ia lihat dan dengar dari lingkungan keluarganya. Jika dalam lingkungan keluarga, anak-anak mendengar dan melihat hal-hal yang baik dari anggota keluarga lain terutama ayah dan ibunya, maka akan terbentuk sikap dan perilaku yang baik pula pada diri anak.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling primer dan paling menentukan karakter diri anak. Orangtua umumnya, ibu atau bapak khususnya, serta adik-kakak dan atau sanak keluarga amat menentukan karakter dasar seseorang. Fatwa-fatwa agama sering menjadi dasar atau kepercayaan budaya sering mewarnai bagaimana orang-orang dalam keluarga berperilaku atau memperlakukan anak dalam keluarga. Perlakuan seperti ini akan mewarnai perilaku dari anak yang bersangkutan.

Seiring dengan penambahan usianya, lingkungannya juga makin bertambah. Pada masa lalu lingkungannya sebatas keluarga, sekarang anak bergaul dengan anak-anak lain

di lingkungan sekitarnya. Di lingkungan ini anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, khususnya anak-anak seusianya. Orang lain di luar orangtuanya atau keluarganya itu juga ikut mewarnai sikap dan perilakunya.

Bersamaan dengan pertambahan usianya itu, anak mulai pula mengenal lingkungan sekolah. Di sini anak secara sistematis dibelajarkan mengenai sesuatu, baik pengetahuan, sikap maupun ketrampilan.

Hakekat pembinaan akhlak/budi pekerti adalah: (a) proses pembinaan, pengembangan, dan perluasan struktur serta potensi dan pengalaman belajar afektual manusia secara layak serta manusiawi; (b) proses pembinaan, pengembangan dan perluasan isi/substansi seperangkat nilai-moral dan norma ke dalam tatanan nilai dan substansi yang interdiatifik dalam arti substansi tidak mungkin mempribadi kalau potensinya tidak terdidik; (3) proses pembelajaran terjadi, bila perangkat potensi diri afektual terpancang dan terlibat melakukan proses pelakonan diri, dan ini hanya mungkin terjadi kalau substansinya layak.

Pendidikan nilai atau pembinaan akhlak/budi pekerti sebagai cara menyikapi atau sudut pandang adalah landasan atau rasional yang menjadi dasar atau pangkal tolak rekayasa pelaksanaan. Dalam menentukan pilihan pendekatan, target harapan serta pola pikir dan falsafah orang atau masyarakat yang bersangkutan amat menentukan. Saat menentukan pilihan pendekatan, tolok ukur yang digunakan hendaknya adalah nilai-moral dan norma agama yang berlaku di masyarakat.

Thomas Lickona (1991) mengemukakan adanya 5 model

pendekatan nilai yang bisa digunakan: (a) Perkembangan moral kognitif, yang dipelopori oleh L. Kolberg, yang meyakini proses kognitif, khususnya afektif hanya mampu berkembang bila terjadi konflik kognitif dan penalaran; (b) Perkembangan moral afektual, antara lain dianut oleh L. Metcalf, Justian Aronfeed, Imam Ghazali, yang meyakini bahwa dunia afektual bisa dibina dan dididik melalui pendekatan dan strategi tertentu dengan esensi pendidikan adalah mempribadikan nilai-moral norma; (c) Perkembangan moral sosial atau model regulasi diri (self-regulation), sebagaimana dilanjutkan antara lain oleh Walter Michel, A. Bandura, dan Skinner serja sejumlah sosiolog modern; (d) Perkembangan moral-biologis (*biological moral development*) seperti dikenalkan oleh H.J. Eysenk, yang pada hakekatnya mengharuskan keterkaitan pembinaan pendidikan nilai dengan perkembangan biologis manusia. Dalam teori pendidikannya khususnya PVCT masalah kualifikasi dan karakter diri siswa memang menjadi salah satu dasar pertimbangan; (e) Pembinaan nilai-moral norma secara holistik, tokoh utamanya Elizabeth Leonie & Simpson, yang mendalilkan keharusan pembinaan diri manusia secara holistik. Pendidikan nilai hanya akan berarari dan manusiawi kalau ketiga potensi diri manusia dilibatkan dan dibina.

Douglas Superka seperti dikutip Peter Martorella (1976) mengemukakan 8 pendekatan dalam pendidikan nilai: (a) *envocation*, yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merespons stimulus pengajaran secara spontan; (b) *inculcation*, pemberian stumulus

terarah atau stimulus mendalam yang sugestif kepada siswa yang direspons secara terarah pula sehingga menghasilkan hasil belajar yang terarah; (c) *moral reasoning*, pemberian stimulus transaksional agar melalui kemampuan berpikir tinggi dihasilkan pemcahan terhadap suatu masalah moral; (d) *value clarification*, melalui pemberian stimulus kepada siswa untuk mengklarifikasi dan melakukan penalaran terhadap nilai-moral norma baik yang obyektif maupun subyektif; (e) *value analysis*, pemberian stimulasi dalam bentuk media untuk dianalisis nilai-nilai yang terkandung didalamnya oleh siswa; (f) *moral awareness*, pemberian stimulasi yang mampu melibatkan struktur diri siswa sehingga terbentuk pendirian yang mantap dalam diri siswa; (g) *commitment approach*, pembuatan komitmen guru-siswa sejak awal mengenai tolok ukur keberhasilan belajar; (h) *union approach*, secara programtik-substansial, kegiatan belajar siswa dipadukan dengan realitas kehidupannya.

Apapun teori pendidikan nilai atau pembinaan akhlak/budi pekerti yang dipakai, faktor terpenting keberhasilannya adalah keteladanan baik dari guru, para orangtua maupun tokoh masyarakat. Oleh sebab itu, fokus penting dalam membangun kerjasama sekolah dengan orangtua adalah bagaimana memformulasikan kerjasama agar bisa menjadi teladan dari setiap siswa yang ada di sekolah. Siswa menteladani guru di sekolah, juga menteladani orangtuanya di rumah.

Agar hubungan sekolah dengan orangtua siswa berjalan baik dalam pembinaan akhlak dan budi

pekerti, ada beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Pertemuan orangtua siswa dengan pihak sekolah merupakan hal yang penting dilakukan. Bukan saja keduanya memang bertanggung jawab atas pendidikan anak, tetapi juga karena dalam pertemuan tersebut pihak orangtua siswa dapat berbagi tanggung jawab kepada pihak guru di sekolah mengenai pembinaan anaknya. Sebaliknya guru juga dapat berbagi tanggung jawab dengan orangtua siswa mengenai tanggung jawab terhadap pendidikan atau pembinaan anak di sekolah. Pertemuan orangtua siswa dengan pihak sekolah dapat dilakukan setiap awal dan akhir semester, tetapi dapat pula dilakukan lebih dari dua kali pertemuan.
2. Layanan konseling keluarga. Orangtua yang mengetahui ada masalah akhlak/budi pekerti anaknya di rumah dapat memanfaatkan jasa layanan konseling ini. Pihak orangtua siswa cukup datang ke sekolah, kemudian meminta konselor sekolah untuk membantu memecahkan problem akhlak/budi pekerti anaknya. Jadi, bukan hanya anaknya yang mendapat bimbingan/konseling dari konselor sekolah, tetapi justru orangtuanya jauh lebih penting agar mereka bisa memperlakukan anak di rumah sesuai dengan tahap perkembangan anaknya.
3. Kunjungan rumah (*Home Visit*) Bila guru ada waktu, ada baiknya guru melakukan kunjungan ke rumah siswa yang akhlak/budi pekertinya dipermasalahkan. Ada baiknya sebelum kunjungan ke rumah siswa yang bersangkutan, diberitahu terlebih dahulu maksud dan tujuan kedatangan guru ke rumah siswa yang bersangkutan. Di rumah siswa yang bersangkutan, guru dapat berbincang-bincang secara informal berbagai hal mengenai siswa yang bersangkutan. Harapannya adalah dari hasil perbincangan itu dapat diketahui akar penyebab permasalahan sikap dan perilaku anak tadi. Pada giliran berikutnya, dapat dicarikan jalan keluar untuk pemecahannya. Kunjungan ke rumah tidak selalu berarti guru yang berkunjung ke rumah. Orangtua dari siswa juga bisa proaktif berkunjung ke rumah guru (pihak sekolah), terlebih lagi kalau dia tahu akan akhlak/budi pekerti anaknya.
4. Buku penghubung. Hakikat buku penghubung adalah alat komunikasi yang menjembatani pihak sekolah dengan orangtua siswa mengenai akhlak/budi pekerti siswa. Hasil pengamatan guru tentang sikap dan perilaku siswa di sekolah dijelaskan di sini, untuk selanjutnya diinformasikan kepada orangtua siswa yang bersangkutan. Begitu pula apa yang terjadi dengan siswa di rumah khususnya yang berhubungan dengan akhlak/budi pekerti siswa, dikomunikasi ke guru. Harapannya adalah agar bisa saling bekerjasama dalam melakukan pengawasan maupun pembinaan terhadap siswa yang bersangkutan.

Tugas Kepala Sekolah, Guru Agama dan Guru Pembinaan Akhlak dalam Pembinaan Akhlak/Budi Pekerti

Dalam salah satu riset yang dilakukan Amrazi Zakso & Aswandi (2004) dilaporkan bahwa tidak banyak guru dan kepala sekolah yang berpendirian bahwa keberhasilan pendidikan budi pekerti sangat tergantung dari keteladanan yang diberikan semua guru, kepala sekolah dan staf sekolah (15,8%), dan guru sebagai model atau contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari (10,8%). Konsekuensinya, banyak di antara guru yang beranggapan bahwa pendidikan budi pekerti adalah wilayah guru agama dan pendidikan kewarganegaraan. Guru-guru yang lain terbebas dari tanggung jawab tersebut.

Agar semua merasa bertanggung jawab atas pembinaan akhlak/budi pekerti di sekolah, maka harus ada pembagian tugas yang jelas di antara kepala sekolah, guru-guru dan guru pembina akhlak (khususnya) guru agama. Pembagian tugas itu secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Kepala sekolah. Karena secara administratif kepala sekolah adalah penanggung jawab sekolah, maka dia juga harus bertanggung jawab atas pembinaan akhlak dan budi pekerti siswa. Keluar masuk surat yang menyangkut kegiatan pembinaan akhlak dan budi pekerti harus sepengetahuan kepala sekolah. Dia juga yang harus merintis kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pembinaan akhlak dan budi pekerti di sekolah.
2. Guru-guru. Setiap guru melekat tugas sebagai pendidik. Oleh sebab itu, perilaku guru di sekolah diminta untuk selalu mencerminkan perilaku sebagai pendidik yang dapat digugu dan ditiru oleh siswa. Setiap guru di sekolah diminta tanggung jawabnya untuk melakukan pembinaan terhadap siswa dalam jumlah tertentu, misalnya satu guru membina 20 siswa. Guru tersebut harus mencermati secara seksama setiap siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Jika terjadi penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah, guru tersebut harus melaporkannya kepada guru pembina akhlak, untuk selanjutnya dicarikan jalan pembinaannya.
3. Guru Pembina Akhlak. Guru ini berfungsi sebagai koordinator kegiatan pembinaan akhlak/budi pekerti. Dia diminta untuk paham betul bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah dengan akhlak/budi pekerti. Dia juga diminta untuk selalu mendiskusikan dengan koleganya setiap temuan guru atau temuannya sendiri berkenaan dengan masalah akhlak/budi pekerti siswa. Dia juga diminta untuk membantu setiap guru melakukan analisis terhadap setiap hasil amatan guru mengenai sikap dan perilaku siswa. Bersama dengan guru-guru lain dan/atau kepala sekolah, guru pembina akhlak ini diminta untuk setiap saat melakukan pembinaan akhlak/budi pekerti kepada siswa.

Langkah-langkah Pembinaan Akhlak/Budi Pekerti Berbasis keluarga

Agar kerjasama sekolah dengan keluarga menjadi efektif, khususnya dalam pembinaan akhlak/budi pekerti, ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

1. Ajak orangtua siswa memformulasikan visi, misi dan program strategis pendidikan. Minta mereka untuk mengarahkan visi, dan misi serta program strategis itu pada pembinaan akhlak/budi pekerti yang luhur, dengan tidak mengesampingkan hasil belajar kognitif;
2. Jelaskan kepada orangtua siswa bahwa pihak sekolah memiliki keterbatasan baik waktu, tenaga maupun dana untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak mereka. Oleh sebab itu, minta mereka untuk ikut bertanggung jawab atas pendidikan anaknya, terutama pembinaan akhlak/budi pekerti anaknya di rumah. Jelaskan kepada mereka bahwa sebagian besar waktu anak dihabiskan bukan di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan keluarga.
3. Bicarakan dengan orangtua siswa bagaimana sekolah memandang akhlak/budi pekerti. Minta mereka mengemukakan pendapatnya tentang hal itu. Jika terjadi perbedaan antara pihak sekolah dengan orangtua siswa mengenai kedua hal tersebut, carilah penyelesaiannya. Usahakan konsep guru dengan konsep orangtua siswa mengenai akhlak/budi pekerti berkesesuaian.
4. Jelaskan kepada orangtua siswa bahwa guru-guru di sekolah selalu

mengamati sikap dan perilaku siswa. Jelaskan pula kepada mereka bahwa kalau terjadi pelanggaran terhadap nilai moral (akhlak) di sekolah, siswa akan diberi pembelajaran. Mintalah orangtua siswa untuk melakukan hal yang sama di rumah, dan melaporkannya ke pihak sekolah sikap dan perilaku anak yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut, yang terjadi di rumah.

5. Mintalah orangtua siswa untuk membantu guru di sekolah dengan cara memberikan setiap responsi yang diminta oleh pihak guru atau sekolah.

Penutup

1. Dengan strategi pembinaan yang lebih menekankan keteladanan kepada siswa, diharapkan pembinaan akhlak/budi pekerti yang dilakukan pihak sekolah dapat mencapai sasaran. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua (keluarga) siswa mutlak diperlukan. Kerjasama tersebut harus berfokus pada upaya pemberian keteladanan kepada siswa agar perilaku sesuai dengan kaidah agama sebagai ukuran akhlak/budi pekerti;
2. Strategi pembinaan akhlak/budi pekerti yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah antara lain adalah dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merespons stimulus pengajaran secara spontan, pemberian stimulus terarah atau stimulus mendalam yang sugestif kepada siswa yang direspons secara terarah pula sehingga meng-

hasilkan hasil belajar yang terarah, pemberian stimulus transaksional agar melalui kemampuan berpikir tinggi dihasilkan pemecahan terhadap suatu masalah moral; klarifikasi nilai melalui pemberian stimulus kepada siswa untuk mengklarifikasi dan melakukan penalaran terhadap nilai-moral norma baik yang obyektif maupun subyektif, pemberian stimulasi dalam bentuk media untuk dianalisis nilai-nilai yang terkandung didalamnya oleh siswa, serta pemberian stimulasi yang mampu melibatkan struktur diri siswa sehingga terbentuk pendirian yang mantap dalam diri siswa;

3. Apapun strategi yang digunakan dalam pembinaan akhlak/budi pekerti pada anak didik, cara yang paling ampuh tetap pemberian keteladanan. Guru memberikan teladan yang baik di sekolah, sementara orangtua di rumah menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam bersikap dan berperilaku, apalagi yang berkaitan dengan akhlak/budi pekerti.

Daftar Pustaka

- Amrazi Zakso & Aswandi. 2004. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti di SMA-SMA Negeri Pontianak. *Laporan Penelitian*. Pontianak: Educational Advocacy Center.
- Harrison, Lawrence E., & Huntington, Samuel P. (Editors) 2000. *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Lickona, T. 1991. *Educating for Character: How Our School*

can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books.

Lickona, T. 1994. *Raising Good Children: From Birth through the Teenage Years* (New York: Bantam books)

Nurudin, 2001. *Komunikasi Propaganda*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Suseno, F. M., 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.

